



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tgk. Bate Timoh No.2. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114

Telepon (0651) 22546, Faximil (0651) 33095

E-mail : dinaspppa@acehprov.go.id, Website. www.dinaspppa.acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 500.12.18 / 008

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2023 dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana Telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan untuk pelayanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
- KETIGA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dimutakhirkan paling lama setahun sekali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Feberuari 2024 M
25 Rajab 1445 H

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH *meut*



MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
19780723 199702 2 001

Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;P
3. Komisi Informasi Aceh
4. Arsip.....

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 NOMOR : 500.12.18 / 008
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) SETIAP SAAT
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 TAHUN 2024**

INFORMASI YANG WAJIB DISAMPAIKAN SETIAP SAAT									
NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Keputusan Kepala Dinas	Daftar Surat Keputusan Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tentatif	√	√	-	
2	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan								
	a. Pedoman pengelolaan organisasi	Pedoman Organisasi 1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. 2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024 Tahun 2019	√ √	√ √	√ √	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai	<p>Profil Pimpinan</p> <p>Nama Kepala Dinas : Meutia Juliana, S.STP, M. Si , Pangkat : Pembina Tingkat I, Gol: IV/b</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat ini di dukung oleh 101 orang pegawai (46 PNS dan 55 Non PNS yang terdiri dari 34 Laki-Laki dan 67 Perempuan) dengan rincian Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub bagian, 11 orang Pejabat Fungsional hasil penyetaraan, 29 orang Pelaksana dan didukung 55 Tenaga Kontrak (non PNS) untuk membantu menjalankan tugas-tugas rutin maupun kegiatan yang ada di dinas.</p>	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tentatif	√	√	√	
	c. Anggaran Dinas PPPA Aceh	<p>Anggaran dan Sumber Anggaran Tahun 2024</p> <p>APBA sebesar Rp. 16.374.414.780,-</p>	Sekretaris Dinas	<p>Analisis Keuangan Pusat/ DaerahAhli Muda</p> <p>Perencana Ahli Muda</p>	Tahun 2024	√	√	√	
		<p>Informasi Terkait PPPA</p> <p>1. Kelembagaan urusan pemerintahan bidang PPPA Provinsi adalah dinas yang mandiri sedangkan urusan pemerintahan bidang PPPA Kab/Kota bergabung dengan beberapa urusan pemerintah lainnya</p> <p>2. Profil Kelembagaan Urusan PPPA Kab/Kota</p>	<p>Kepala Bidang DIGA</p> <p>Sekretaris Dinas</p>	<p>Analisis Kebijakan Ahli Muda</p> <p>Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum</p>	Setiap Awal Tahun	√	√	√	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)	Kepala Bidang PPA	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Triwulan				
		4. Produk Layanan Dinas PPPA Aceh adalah UPTD PPA dan Penanganan bagi Korban KTPA melalui UPTD PPA	Kepala UPTD PPA	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Seksi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak					
		5. IPG dan IDG Provinsi dan Kabu/Kota Aceh	Kepala Bidang KHPK	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kualitas Keluarga	Tahunan				
		6. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Kepala Bidang PHA	Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya	Tahunan				
		7. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kepala Bidang PHA	Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya	Tahunan				
		8. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kpala Bidang PPA	Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi Perlindungan Khusus Anak	Tahunan				

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>9. Indeks Ketahanan Keluarga</p> <p>Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:</p> <p>a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;</p> <p>b. Ketahanan fisik;</p> <p>c. Ketahanan ekonomi;</p> <p>d. Ketahanan sosial psikologi; dan</p> <p>e. Ketahanan sosial budaya.</p> <p>Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari berbagai survei yang dilaksanakan KPPPA bersama BPS dan Instansi lain yang berkaitan dengan variabel dan indikator penyusunan ketahanan keluarga</p>	Kepala Bidang KHPK	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kualitas Keluarga	Tahunan				

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>12. Kab/Kota Layak Anak</p> <p>Merupakan pengembangan kota layak anak bertujuan membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui beberapa tahapan pengembangan Kota Layak Anak dimulai dari tahapan Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan disertai dengan 5 Klaster Pemenuhan Hak anak yang meliputi :</p> <p>a. Hak sipil dan kebebasan b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan d. Pendidikan, pemanfaatn waktu luang dan budaya</p>	Kepala Bidang PHA	Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA bidang Pengasuhan, Pendidikan & Budaya	Setiap Tahun				
3 Informasi tentang surat perjanjian									
	a. Surat perjanjian	Informasi tentang surat perjanjian berikut dengan dokumen pendukungnya	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jan - Des	√	√	-	
4 Informasi tentang surat dinas									
	a. Surat pimpinan	Informasi surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jan - Des	√	-	-	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Informasi tentang penanganan kasus									
	a. Evakuasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Alur Penanganan Kasus pada UPTD PPA Provinsi Aceh 1 Mitra/Korban bisa datang sendiri/ rujukan / penjangkauan 2 Diterima oleh petugas pengaduan 3 Dilakukan assesmen kebutuhan 4 Diberi layanan sesuai kebutuhan assesmen 5 Terminasi dan kasus selesai	Kepala UPTD PPA Provinsi Aceh	KTU UPTD PPA	Tahun 2023	√	√	√	
6 Informasi tentang perbendaharaan dan inventaris									
	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan	Realisasi tahun 2022 Informasi rencana dan capaian program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan 1 Realisasi Keuangan : Rp.16.106.548.600,- 2 Realisasi fisik : 96,45%	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Setiap Bulan	√	√	√	
	b. SPJ Fungsional	Laporan pertanggungjawaban fungsional	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Setiap Triwulan	√	-	-	
7 Informasi tentang Renstra dan Renja									
	a. Renstra	Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda pada Subbag Program, Informasi dan Humas	Setiap 5 Tahun (khusus periode sekarang 4 tahun)	√	√	√	5 Tahun

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Sasaran</p> <p>Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan</p> <p>Indikator Tujuan</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>Indikator Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Tatal Fertility Rate (TFR) 5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan PPA 							
	b. Renja	<p>Rencana Kerja Tahun 2024</p> <p>Untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dan adil dengan laki-laki, serta membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi ditandai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk kualitas kinerja aparatur 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur 3. Meningkatnya penguatan pemberdayaan perempuan 4. Meningkatnya kualitas implementasi PUG 	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda pada Subbag Program, Informasi dan Humas	Awal Tahun	√	√	√	1 Tahun

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Meningkatnya penguatan layanan dan ketahanan keluarga 6. Meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 8. Meningkatnya komitmen, koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak							
8	Informasi tentang agenda Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Agenda kerja pimpinan	Jadwal kerja pimpinan sesuai tupoksi Dinas PPPA	Sekretaris Dinas	Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Setiap Bulan/Awal Tahun	√	√	-	
9	Informasi tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Aceh								
	a. Profil UPTD PPA	UPTD PPA TUGAS UPTD PPA merupakan perangkat teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak	Kepala UPTD PPA	Kasubag Tata Usaha	Tahun 2019	√	√	√	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>FUNGSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan 2. Layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum 3. Layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi 4. Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 5. Layanan bagi perempuan dan anak mengalami permasalahan lainnya bidang PPPA 6. Penerimaan pengaduan dan klarifikasi 7. Pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 8. Pengembangan sistem rujukan 9. Perlindungan sementara/rumah perlindungan 10. Mediasi 11. Pendampingan dan pemulihan <p>Berkedudukan di Jalan Tgk. Bate Timoh Nomor 2 Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh</p>							

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>HOTLINE UPTD PPA DINAS PPPA ACEH : 0811 6808 875</p> <p>Telp. UPTD PPA 0812 9588 0911, 0852 6274 8875 dan 0852 6274 8934</p> <p>Fax. UPTD PPA 0651 33095</p> <p>Email UPTD PPA uptdppaaceh@gmail.com</p> <p>JENIS LAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Masyarakat 2. Penjangkauan Korban 3. Pengeloaan Kasus 4. Penampungan Sementara 5. Mediasi 6. Pendampingan Korban 							

Banda Aceh, 06 Februari 2024



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh

Meutia Juliana
MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19780723 199702 2 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 NOMOR : 500.12.18 / 008
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BERKALA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 TAHUN 2024**

INFORMASI YANG WAJIB DISAMPAIKAN SECARA BERKALA									
NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Informasi tentang Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Profil Dinas Pemberdayaan	<p>Ruang Lingkup</p> <p>Dinas PPPA Aceh berdomisili di Jl. Tgk. Bate Timoh No. 2 Banda Aceh</p> <p>Ruang lingkup menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh</p> <p>Tugas</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p>	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	Selama Berlaku

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2 Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3 Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah; 4 Pemberdayaan perempuan bidang politik hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 5 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintaskabupaten/kota; 6 Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota 7 Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsidanlintas kabupaten/kota; 8 Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota; 9 Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah dandunia usaha; 10 Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota 11 Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi 12 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi 							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>13 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota;</p> <p>14 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;</p> <p>15 Pengumpulan, pengolahan, analisis dan Penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat provinsi;</p> <p>16 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas</p> <p>17 Pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan</p> <p>18 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>							
	b. Struktur Organisasi	<p>Susunan Organisasi dan Profil Pejabat</p> <p>Susunan organisasi dan Profil Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh</p> <p>1 Kepala Dinas, (Meutia Juliana, S.STP, M.Si)</p> <p>2 Sekretaris Dinas, (Meutia Juliana, S.STP, M.Si)</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Program, Informasi dan Humas, (Drs. Zulkarnaini, MPA)</p> <p>Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Mudapada Keuangan dan Pengelolaan Aset, (Dra. Nurul Aliah)</p> <p>Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum, (Syahrizal, S.Sos)</p>	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	Selama Berlaku

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>3 Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, (Dasrita Bakri, S.Si, MPA) Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi, (Inayah, SP, MP) Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sospol dan Hukum, (Julie Sari Avolita, SP, MP) Plt. Sub Koordinator Kualitas Keluarga, (Desi Sarmila Travianti, S.T)</p>							
		<p>4 Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, (Dra. Teja Sekar Tanjung) Analisis Kebijakan Ahli Muda Data dan Informasi Gender, (Nofita Yulandari D, S.Kep) Plt. Sub Koordinator Data dan Informasi Anak, (Devi Purnamasari, SKM, MPH) Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi, (Asmulyadi, S.Sos)</p>							
		<p>4 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, (Amrina Habibi, SH) Sub Koordinator Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, (-) Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, (Devi Irlainy, S.Sos) Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (Chairil Amri, S.Sos, MM)</p>							
		<p>5 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Ir. Yuslita, MM). Sub Koordinator Perlindungan Perempuan, (Sri Wahyuni, Sp. M.Si). Penyuluh Sosial Ahli Muda Perlindungan Khusus Anak, (Isnaniah, A.Md.Kep). Penyuluh Sosial Ahli Muda Data Kekerasan Perempuan dan Anak, (Tiara Sutari AR, S.STP).</p>							
		<p>6 Kepala UPTD PPA Aceh (Dra. Ir. Mayani) Subbagian Tata Usaha (Faula Mardaliya, SE) Seksi Pengaduan dan Klarifikasi (M. Nur, S. TP) Seksi Tindak Lanjut Kasus (Ns. Nurjanisah, Skep, M. Kep)</p>							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	c. Visi dan Misi	<p>Visi Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani</p> <p>Misi Mewujudkan Akses dan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Mudah, Berkualitas dan Terintegrasi</p> <p>Tujuan Untuk mencapai visi di atas misi, maka tujuan yang harus dijalankan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencapaian kinerja yang berkualitas 2 Penguatan berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender 3 Peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi dalam politik 4 Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) kepada SKPA dan pemerintah daerah 5 Penguatan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan SIGA sebagai acuan propinsi dan Kab/Kota 6 Membangun sistim layanan terpadu, integrated dan holistik dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Periode Tahun 2017-2022 dan 2023-2026	√	√	√	5 Tahun dan 4 Tahun

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	d. Rencana Strategis	<p>Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Dinas PPPA Aceh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 2 Meningkatnya kesejahteraan perekonomian perempuan melalui pengembangan industri rumahan 3 Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PPRG 4 Meningkatkan partisipasi/ peran aktif perempuan potensial atau kader partai di bidang sosial, politik dan 5 Meningkatnya ketahanan keluarga 6 Meningkatnya partisipasi organisasi/lembaga atau forum dalam msasyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak 7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem data gender dan anak 8 Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak 9 Meningkatkan kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan 10 SKPA/ gugus tugas KLA Propinsi dan Kab/ Kota dan Forum Anak 11 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban 12 Berkurangnya tindak kekerasan akibat dimedia online 13 Mengoptimalkan sistem perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan 	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2017-2022	√	√	√	5 Tahun dan 4 Tahun

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	e Sumber Daya Manusia yang dimiliki	<p>Jumlah Pegawai PNS/Non PNS</p> <p>Jumlah Pegawai 101 Orang Perincian 46 PNS dan 55 Non PNS terdiri dari Laki-laki = 34 dan Perempuan = 67</p> <p>Jumlah Pegawai Menurut Golongan</p> <p>Golongan II : 1 Orang (L=0 dan P=1) Golongan III : 31 Orang (L=7 dan P=24) Golongan IV : 13 Orang (L=2 dan P=11)</p> <p>Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan</p> <p>SD : 1 orang (L=0 dan P=1) SLTA : 22 Orang (L = 14 dan P= 8) D-3 : 9 Orang (L= 5 dan P=4) S-1 : 53 Orang (L =13 dan P= 40) S-2 : 16 Orang (L= 2 dan P= 15)</p>	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	
2	Informasi Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Nama Program dan Kegiatan	<p>Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran dan outcome, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 6 program teknis PPPA dan kegiatannya masing-masing, yaitu:</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi <p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Provinsi 	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>Program Perlindungan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi <p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi <p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi <p>Program Perlindungan Khusus Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP																																																																																																																																					
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE																																																																																																																																						
	b. Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Penanggung Jawab Plt .Kepala Dinas, Meutia Juliana,S.STP,M.Si Pelaksana APBA : 1 Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum, (Drs. Zulkarnaini,MPA) 2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi, (Inayah, SP, MP) 3 Analis Kebijakan Ahli Muda Sistem Data dan Publikasi Informasi, (Asmulyadi, S.Sos) 4 Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (Chairil Amri, S.Sos, MM) 5 Penyuluh Sosial Ahli Muda Data Kekerasan Perempuan dan Anak, (Tiara Sutari AR, S.STP). 6 Seksi Pengaduan dan Klarifikasi (Paula Mardalya, SE)	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2024	√	√	√																																																																																																																																						
	c. Target dan Capaian Program dan Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>INDIKATOR KINERJA</th> <th>SATUAN</th> <th>TARGET</th> <th>REALISASI</th> <th>CAPAIAN KINERJA</th> <th>KET</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">SASARAN: MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</td> <td>%</td> <td>92,67</td> <td>92,55</td> <td>99,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</td> <td>%</td> <td>65,48</td> <td>63,56</td> <td>97,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja operasi APBA</td> <td>%</td> <td>13,02</td> <td>12,82</td> <td>98,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 Dimensi penguatan kualitas keluarga</td> <td>%</td> <td>60,5</td> <td>56,52</td> <td>93,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan</td> <td>%</td> <td>19,23</td> <td>23,08</td> <td>120,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Persentase kab/kota menuju layak anak (KLA)</td> <td>%</td> <td>28</td> <td>34,78</td> <td>124,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>76,92</td> <td>96,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Persentase Wanita berumur 15 s.d 49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB</td> <td>%</td> <td>43,38</td> <td>43,44</td> <td>100,14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET	1	2	3	4	5	6	7	SASARAN: MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN							1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,67	92,55	99,87		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,48	63,56	97,07		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							3	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja operasi APBA	%	13,02	12,82	98,46		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100,00		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							5	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 Dimensi penguatan kualitas keluarga	%	60,5	56,52	93,42		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							6	Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan	%	19,23	23,08	120,02		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK							7	Persentase kab/kota menuju layak anak (KLA)	%	28	34,78	124,21		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	80	76,92	96,15		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							9	Persentase Wanita berumur 15 s.d 49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB	%	43,38	43,44	100,14		Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																								
SASARAN: MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN																																																																																																																																														
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,67	92,55	99,87																																																																																																																																									
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,48	63,56	97,07																																																																																																																																									
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																																																																																																																																														
3	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja operasi APBA	%	13,02	12,82	98,46																																																																																																																																									
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																																																																																																																																														
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100,00																																																																																																																																									
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																																																																																																																																														
5	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 Dimensi penguatan kualitas keluarga	%	60,5	56,52	93,42																																																																																																																																									
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																																																																																																																																														
6	Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan	%	19,23	23,08	120,02																																																																																																																																									
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK																																																																																																																																														
7	Persentase kab/kota menuju layak anak (KLA)	%	28	34,78	124,21																																																																																																																																									
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																																																																																																																																														
8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	80	76,92	96,15																																																																																																																																									
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																																																																																																																																														
9	Persentase Wanita berumur 15 s.d 49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB	%	43,38	43,44	100,14																																																																																																																																									

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan Januari s.d Desember 2024	Sekretaris, Kabid. KHPK, Kabid DIGA, Kabid. PHA, Kabid. PPA dan Kepala UPTD PPA	Para PPTK	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	
	e. Anggaran Program	Anggaran dan sumber anggaran tahun 2024 Nilai Anggaran sebesar Rp. 16.374.414.780,- PAA = Rp. 8.130.135.684,- DBH = Rp. 473.979.530,- DAU = Rp. 4.112.268.832,- DNFISIK = Rp. 406.000000,- OACEH = Rp. 3.252.030.734,-	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√		
	f. Agenda Penting	Hari Anak direncanakan pada Juli 2024 Menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif keluarga, masyarakat, dunia usaha, Pemerintah dan Negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mewujudkan peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Hari Ibu direncanakan pada 22-25 Desember Perjalanan sejarah yang melatarbelakangi Peringatan Hari Ibu dari awal ditetapkan hingga saat ini, memperlihatkan jejak perjuangan perempuan Indonesia yang telah menempuh jalan panjang untuk mewujudkan peranan dan kedudukan perempuan Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Bibit kebangkitan perjuangan perempuan Indonesia telah dimulai sebelum masa kemerdekaan, yang ditandai perjuangan pendekar perempuan diberbagai tempat di Indonesia, seperti Tjuk Njak Dien di Aceh, Nji Ageng Serang di Jawa Barat, R.A Kartini di Jawa Tengah, serta masih banyak lagi yang lain	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Penyuluh Sosial Ahli Muda Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
3	Informasi tentang kinerja dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	<p>Gambaran Kinerja yang dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam target yang telah ditetapkan dalam tahun 2023</p> <p>Target indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Capaian indikator kinerja Dinas PPPA Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA 2023-2026 secara rinci sebagai berikut:</p> <p>a. Pengukuran kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas PPPA Tahun 2023 dinyatakan “berhasil dengan kategori BAIK”, yaitu capaiannya sebesar 96,26%.</p> <p>b. Capaian indikator 1 pada Sasaran Strategis 1 "Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan dan Politik" yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian IPG untuk tahun 2023 yaitu sebesar 92,55% belum mencapai target sebesar 92,67% sehingga capaian kinerja sebesar 99,87%.</p> <p>c. Capaian indikator 2 pada Sasaran Strategis 1 "Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan dan Politik" yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG untuk tahun 2023 yaitu sebesar 63,56% belum mencapai target sebesar 95,48% sehingga capaian kinerja sebesar 97,07%.</p>	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>d. Capaian indikator Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak "yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA merupakan kompilasi dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), angka IPA tahun 2023 belu dipublikasi sehingga masih menggunakan angka di tahun 2022. IPA Aceh sebesar 64,21% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 76,30% sehingga capaian kinerja sebesar 84,15%.</p> <p>e. Capaian indikator Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan Serta Pendampingan Bantuan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak "yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum. Layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 100%, sedangkan layanan dan rujukan bantuan hukum terlayani 100% namun baru terselesaikan sebesar 33,33%. Hal ini wajar karena dari jumlah korban yang memerlukan layanan bantuan hukum sebanyak 33 orang baru terselesaikan sebanyak 11 orang dikarenakan permasalahan hukum yang berbeda dan kompleks yang perlu penanganan berkelanjutan, apalagi kasus terlapor menjelang di triwulan akhir.</p> <p>f. Capaian indikator pada Sasaran Strategis 4 "Meningkatkan Kualitas Penduduk" yaitu Total Fertility Rate (TFR). Target TFR untuk Provinsi Aceh pada tahun 2023 sebesar 2,15% dan capaian angka TFR Aceh sebesar 2,34% sehingga masih dalam rentang target. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,15 merupakan angka standar capaian ideal bagi Aceh yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. TFR yang berada di bawah angka 2,15 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,15 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk. TFR Aceh sebesar 2,15 atau sesuai LF-SP2020 sebesar 2,34 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.</p>							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		g. Indikator ke 7 yaitu Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK, namun apabila dibandingkan dengan target Renstra maka capaian hanya sebesar 56,25% atau dengan kategori KURANG, perlu menjadi perhatian khusus disebabkan capaian kinerja pada setiap tahunnya dibandingkan dengan target Renstra hanya pada tahun							
	b. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan	Realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2023	√	√	-	
	c. Laporan umum	Informasi terkait kegiatan yang akan, sedang dan telah berlangsung :	Sekretaris, Kabid. KHPK, Kabid DIGA, Kabid. PHA, Kabid. PPA dan Kepala UPTD PPA	Para PPTK	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	
4	Ringkasan laporan keuangan								
	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan	Realisasi Akhir Tahun 2023 Informasi rencana dan capaian program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar 96,45 % atau sebesar Rp 16.106.548.600,- dari pagu Rp 16.700.119.781-.	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	-	
	b. Neraca	Periode 31 Desember 2023 Total kewajiban dan ekuitas	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	
	c. Arus kas	Laporan dan catatan arus kas sesuai standar akuntansi	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Awal Tahun	√	√	-	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	d. Daftar aset dan inventaris	Ringkasan daftar aset dan inventaris setelah rekon aset per 31 Desember 2023 Bidang Tanah Unit Alat-alat besar Unit Alat-alat angkutan Unit Alat bengkel dan alat ukur Unit Alat kantor dan rumah tangga Unit Alat studio dan komunikasi Bangunan gedung Bangunan air/irigasi Instalasi Jaringan Buku dan perpustakaan Barang bercorak kebudayaan	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	
5	Ringkasan laporan akses informasi publik								
	a. Permintaan informasi publik di DPPPA	Daftar permintaan informasi publik di DPPPA Dari 61 informasi yang diharapkan, terpenuhi sebanyak 55 informasi	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Jan - Des Tahun 2023	√	√	√	
	b. Waktu yang diperlukan terkait permintaan informasi	Rentang waktu 1. Jawaban atas informasi selambatnya 10 hari 2. Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selama 7 hari	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	Selama Berlaku
	c. Permintaan informasi yang ditolak DPPPA	Daftar informasi yang ditolak DPPPA Terdapat 6 pemohon yang tidak mendapatkan data dan informasi sesuai permohonan 1 Peran KPPAI thd Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 2 Kekerasan seksual di Aceh Tahun 2020 dan Tahun 2023 3 Implementasi Sekolah Ramah Anak di SMP se Kota Banda Aceh 4 Analisis penyebab tingginya angka cerai gugat (dampak yang dialami) Provinsi Aceh 5 Study kasus Eksploitasi terhadap anak di Kota Banda Aceh	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jan - Des	√	√	-	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		6 Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Banda Aceh							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	d. Alasan penolakan informasi	Dikarena tidak tersedia nomor kontak pada Surat Permohonan konfirmasi Informasi tidak diberikan karena tidak memenuhi syarat Penolakan permintaan informasi dikarenakan tidak ada data yang dilaporkan pada UPTD PPA Aceh Tidak dapat dilayani Penguasaan Informasi pada publik lain Diarahkan ke DP3AKB Kota Banda Aceh Karena Wilayah Penelitian	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jan - Des	√	√	-	
6 Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Dinas PPPA Aceh									
	a. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan	Rancangan peraturan terkait PPPA Daftar rancangan peraturan terkait PPPA yang berdampak pada publik tahun 2024 1. Rancangan Revisi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Daftar peraturan terkait PPPA yang berdampak pada publik tahun 2023 1. Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 57 Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar Penyelenggaraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Sekretaris Dinas dan Para Kepala Bidang	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tahun 2023	√	-	-	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	b Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan	<p>Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Daftar peraturan perundang-undangan dan keputusan yang telah diterbitkan terkait PPPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang 2 Peraturan Pemerintah 3 Instruksi Presiden 4 Peraturan Menteri 5 Qanun 6 Peraturan Gubernur 7 Surat Keputusan Gubernur 8 Surat Edaran Gubernur 9 Keputusan Kepala Dinas 	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Setiap Tahun	√	√	√	Selama Berlaku
7 Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik									
	a. Proses memperoleh informasi	<p>Tata cara memperoleh informasi, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Permohonan informasi hard copy, soft copy atau on line melalui form yang tersedia 2 Petugas melakukan pencatatan permohonan informasi 3 Pemberitahuan permohonan informasi diterima/ditolak melalui form yang tersedia 4 Penyerahan informasi dibuktikan dengan form yang tersedia 	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Dinas PPPA, 2021	√	√	√	Selama Berlaku
	b. Personal helpdesk	<p>Contact Person yang dapat dihubungi terkait permintaan informasi publik</p> <p>Ir. Rosalina, Hp: 08126922153</p>	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda	Dinas PPPA, 2024	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
8	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan terkait								
	a. Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi rencana dan pemenang tender	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jan - Des	√	√	-	
9	Informasi tentang prosedur peringatan dini								
	a. Prosedur evakuasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Alur Penanganan Kasus pada UPTD PPA <ol style="list-style-type: none"> 1 Mitra/Korban bisa datang sendiri/rujukan/ penjangkauan 2 Diterima oleh petugas pengaduan 3 Dilakukan assesmen kebutuhan 4 Diberi layanan hukum/psikolog/rohaniawan sesuai kebutuhan 5 Mediasi, penampungan sementara dan pendampingan 6 Terminasi dan kasus selesai 	Kepala UPTD PPA	KTU UPTD PPA	UPTD PPA	√	√	-	Selama Berlaku

Banda Aceh, 06 Februari 2024



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

meut
MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19780723 199702 2 001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 NOMOR : 500.12.18 / 008
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) SERTA MERTA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 TAHUN 2024**

INFORMASI YANG WAJIB DISAMPAIKAN SECARA SERTA MERTA									
NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Informasi tentang penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak								
	a. Mekanisme pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Informasi tentang penyelenggaraan fungsi pelayanan pengaduan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Pengaduan dan Klarifikasi	Setiap Kejadian	√	√	√	Selama Berlaku
	b. Mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Informasi tentang penyelenggaraan fungsi pelayanan penanganan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan		Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus	Setiap Kejadian	√	√	√	Selama Berlaku

Banda Aceh, 06 Februari 2024
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

meut
MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19780723 199702 2 001



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 NOMOR : 500.12.18 / 008
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DIKECUALIKAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
 TAHUN 2024**

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN									
NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Informasi tentang penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak								
	a. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri pelaku, korban dan saksi korban	Informasi identitas yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat diungkap apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus	Setiap Kejadian	-	-	-	
	b. Nama terang tersangka, korban, saksi, ahli, dan pelopor	Informasi identitas yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat diungkap apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Pengaduan dan Klarifikasi	Setiap Kejadian	-	-	-	
	c. Berkas perkara kasus yang informasinya dikecualikan	Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus	Setiap Kejadian	-	-	-	



Banda Aceh, 06 Februari 2024
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
Meutia Juliana
MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19780723 199702 2 001

